

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Dengan Menggunakan Metode Vertikal Dan Horizontal Pada Tahun Anggaran 2019-2023 (Studi Pada BPKAD Tanah Bumbu)

¹Sururum Marpuah

¹Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan 2024

²Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Sosial Humaniora e-mail:
sururummarpuah@gmail.com

ABSTRACT

Introduction. This study analyzes the financial performance of Tanah Bumbu Regency from 2019-2023 using vertical and horizontal analysis methods. Understanding local government financial management is crucial for ensuring fiscal sustainability and effective public service delivery.

Research Methods. This research employs a descriptive quantitative approach, utilizing secondary data from financial reports obtained through documentation methods. The study focuses on Budget Realization Reports for a comprehensive five-year analysis.

Data Analysis. Vertical and horizontal analysis techniques are applied to examine the structure and trends in local government revenues and expenditures. This approach allows for both year-on-year comparisons and assessment of fiscal components' relative proportions.

Results and Discussion. Findings reveal a significant increase in total revenue (81.26%) from 2019 to 2023, albeit with high dependency on central government transfers (93.08% in 2023). A shift in expenditure priorities is observed, with increased capital spending (37.43% in 2023) and reduced personnel expenses.

Conclusion and Recommendations. The study concludes that while showing positive growth, Tanah Bumbu Regency faces challenges in fiscal independence. Recommendations include strategies to enhance local revenue sources and optimize operational expenditures.

Keywords: financial performance, local government, fiscal management

ABSTRAK

Pendahuluan. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2019-2023 menggunakan metode analisis vertikal dan horizontal. Pemahaman tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk menjamin keberlanjutan fiskal dan penyediaan layanan publik yang efektif.

Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, memanfaatkan data sekunder dari laporan keuangan yang diperoleh melalui metode dokumentasi. Studi ini berfokus pada Laporan Realisasi Anggaran untuk analisis komprehensif selama lima tahun.

Analisis Data. Teknik analisis vertikal dan horizontal diterapkan untuk meneliti struktur dan tren pendapatan serta belanja pemerintah daerah. Pendekatan ini memungkinkan perbandingan tahun ke tahun dan penilaian proporsi relatif komponen fiskal.

Hasil dan Pembahasan. Temuan menunjukkan peningkatan signifikan dalam total pendapatan (81,26%) dari 2019 ke 2023, meskipun dengan ketergantungan tinggi pada transfer pemerintah pusat (93,08% pada 2023). Terlihat pergeseran prioritas belanja, dengan peningkatan belanja modal (37,43% pada 2023) dan penurunan belanja pegawai.

Kesimpulan dan Saran. Studi menyimpulkan bahwa meskipun menunjukkan pertumbuhan positif, Kabupaten Tanah Bumbu menghadapi tantangan dalam kemandirian fiskal. Rekomendasi meliputi strategi untuk meningkatkan sumber pendapatan lokal dan mengoptimalkan belanja operasional.

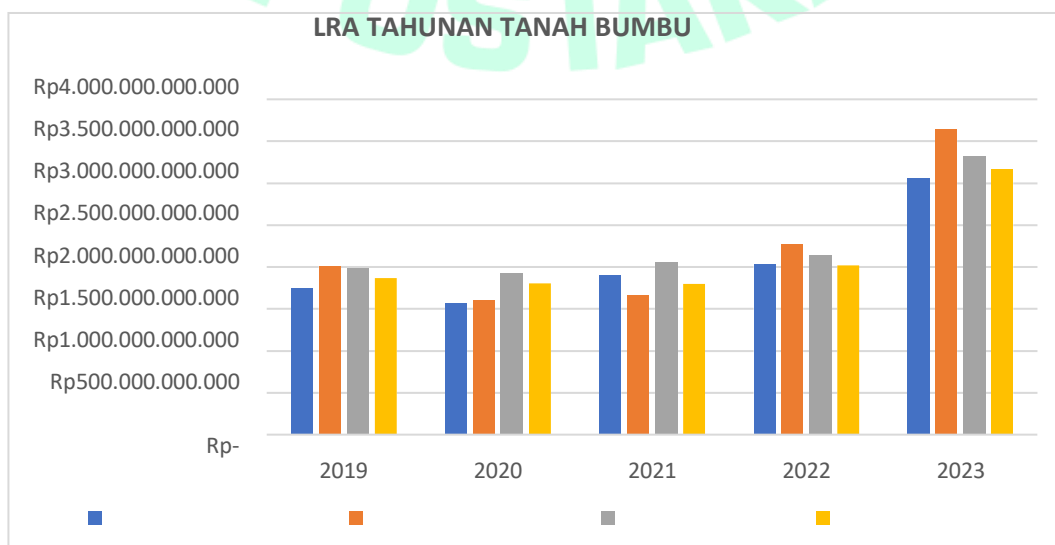
Kata Kunci: kinerja keuangan, pemerintah daerah, manajemen fiskal

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangan dengan bijaksana guna mencapai tujuan pembangunan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam konteks ini, analisis laporan keuangan menjadi instrumen vital untuk menilai kinerja keuangan daerah, terutama dengan menggunakan metode vertikal dan horizontal yang memungkinkan analisis mendalam terhadap komposisi dan tren keuangan dari waktu ke waktu (Kasmir, 2019). Studi ini berfokus pada analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selama periode anggaran 2019-2023, dengan menggunakan data dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Bumbu. Pemilihan periode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati tren dan pola kinerja keuangan pemerintah daerah selama lima tahun terakhir, yang mencakup periode sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19. Hal ini memberikan konteks yang unik untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang signifikan.

Aspek keuangan merupakan dimensi kritis dalam menilai dan mengevaluasi kesehatan keuangan suatu entitas, baik itu perusahaan maupun pemerintah. Seperti yang dikemukakan oleh Nur (2021), aspek keuangan berfungsi sebagai sarana untuk menilai kelayakan usaha baik dalam skala besar maupun kecil, serta organisasi profit dan non-profit. Dalam konteks pemerintahan daerah, analisis keuangan menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan tidak hanya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi dari alokasi anggaran tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis laporan keuangan, sebagaimana didefinisikan oleh Kasmir (2019), adalah proses yang disusun berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, untuk mengungkapkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, analisis ini mencakup pemeriksaan terhadap aset (kekayaan), kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) yang tercermin dalam neraca, serta pendapatan dan belanja yang tertuang dalam laporan realisasi anggaran. Melalui analisis ini, dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah, termasuk efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas pencapaian target pendapatan.

Kinerja keuangan, menurut Brigham dan Houston (2018), merupakan evaluasi atau pengukuran kesehatan dan efisiensi keuangan suatu entitas. Dalam konteks pemerintahan daerah, kinerja keuangan tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan pendapatan dan mengelola belanja, tetapi juga dari sejauh mana pengelolaan keuangan tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi kinerja keuangan ini menjadi sangat penting untuk pengambilan keputusan strategis, perencanaan anggaran, dan penilaian risiko dalam konteks keuangan publik. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selama periode 2019-2023, berikut disajikan grafik Laporan Realisasi Anggaran:



Gambar 1. Grafik Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023

Grafik di atas menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Tanah Bumbu selama periode 2019-2023. Terlihat adanya tren peningkatan anggaran pendapatan dan belanja dari tahun ke tahun, namun realisasinya tidak selalu mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, serta efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggunakan metode vertikal dan horizontal. Metode vertikal akan digunakan untuk menganalisis komposisi atau struktur keuangan dalam satu periode anggaran, sedangkan metode horizontal akan digunakan untuk menganalisis tren atau perubahan kinerja keuangan dari tahun ke tahun. Kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pemilihan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan sektor pertambangan, pertanian, dan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Kedua, sebagai daerah yang relatif muda (dibentuk pada tahun 2003), Kabupaten Tanah Bumbu masih dalam proses pengembangan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, fluktuasi realisasi anggaran yang terlihat dalam grafik di atas menunjukkan adanya dinamika yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam konteks Indonesia. Penggunaan kombinasi metode vertikal dan horizontal dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah masih relatif jarang dilakukan, sehingga penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dalam metodologi analisis keuangan sektor publik.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Analisis yang mendalam terhadap kinerja keuangan selama lima tahun terakhir dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki, baik dalam hal perencanaan anggaran, realisasi pendapatan, maupun efisiensi belanja. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja keuangan mereka. Lebih lanjut, penelitian ini juga memiliki implikasi penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya analisis yang transparan dan komprehensif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dana publik dikelola dan digunakan. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran daerah, yang merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga relevan dengan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di seluruh Indonesia. Dengan adanya studi kasus yang mendalam tentang kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga tentang tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di tingkat daerah. Selain analisis kuantitatif, penelitian ini juga akan melibatkan analisis kualitatif untuk memberikan konteks dan interpretasi terhadap temuan-temuan kuantitatif. Hal ini akan mencakup wawancara dengan pejabat terkait di BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

Struktur penelitian ini akan dimulai dengan tinjauan literatur yang komprehensif tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, termasuk penjelasan detail tentang metode analisis vertikal dan horizontal. Selanjutnya, akan disajikan metodologi penelitian yang mencakup sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan. Bagian

hasil dan pembahasan akan menyajikan temuan-temuan utama dari analisis vertikal dan horizontal, disertai dengan interpretasi dan diskusi mendalam tentang implikasi temuan tersebut. Akhirnya, kesimpulan akan merangkum temuan-temuan utama dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di masa depan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan tidak hanya bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, tetapi juga bagi literatur akademik tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi katalis untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam tentang berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk efektivitas kebijakan fiskal daerah, dampak alokasi anggaran terhadap pembangunan daerah, dan peran partisipasi masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

II. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penggambaran sistematis dan objektif tentang fenomena yang diteliti menggunakan data numerik (Wild, Subramanyam, dan Halsey, 2020). Studi ini melibatkan penelitian lapangan, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data yang relevan.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian merupakan aspek krusial dalam memastikan konsistensi dan objektivitas pengukuran. Dalam penelitian ini, variabel-variabel utama didefinisikan sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

| Variabel | Definisi Konseptual | Indikator | Metode Pengukuran | Skala Pengukuran |
|------------------------------------|--|---|----------------------------|------------------|
| Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien. | Total Pendapatan / Total Pengeluaran | Analisis laporan keuangan | Rasio |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di wilayahnya | (Pajak Daerah Tahun Berjalan - Pajak Daerah Tahun Sebelumnya) / Pajak Daerah Tahun Sebelumnya) x 100% | Analisis laporan keuangan | Nominal |
| Belanja Daerah | Pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan | (Belanja Operasi Tahun Berjalan - Belanja Operasi Tahun Sebelumnya) / | Analisis laporan keuangan. | Nominal |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | Belanja Operasi Tahun Sebelumnya) x 100% | | |
|--|--|--|--|--|

Tabel di atas menunjukkan definisi operasional dari variabel-variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional ini penting untuk memastikan konsistensi dalam pengukuran dan interpretasi data.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Data kuantitatif yang digunakan meliputi angka-angka dari neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Sumber data sekunder ini dipilih karena memberikan informasi yang komprehensif dan terverifikasi tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dokumenter yang relevan, termasuk laporan keuangan dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Proses pengumpulan data melibatkan pengajuan permohonan penelitian secara formal kepada instansi terkait untuk mendapatkan akses terhadap laporan keuangan yang diperlukan.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan fokus pada analisis vertikal dan horizontal. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam menggambarkan variabel secara akurat berdasarkan data numerik yang mencerminkan keadaan sebenarnya (Wild, Subramanyam, dan Halsey, 2020).

Tabel 2. Metode Analisis Keuangan

| Alat Pengukur | Indikator |
|------------------|---|
| Vertikal | Perbandingan antara pos yang satu dan pos yang lainnya pada laporan yang sama untuk tahun (Periode) yang sama. |
| Horizontal | Perbandingan masing-masing pos dalam laporan keuangan pada satu tahun terhadap tahun sebelumnya (periode). |
| Laporan Keuangan | Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. |

| | |
|------------------|---|
| Kinerja Keuangan | Kinerja keuangan adalah suatu kemampuan yang dicapai oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan sebuah perusahaan. |
|------------------|---|

Analisis vertikal dilakukan dengan membandingkan pos-pos dalam laporan keuangan pada periode yang sama, sementara analisis horizontal membandingkan pos-pos yang sama antara periode yang berbeda. Kombinasi kedua metode ini memungkinkan evaluasi komprehensif terhadap struktur keuangan dan tren kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selama periode 2019-2023.

Melalui pendekatan metodologis ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan objektif tentang kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan perencanaan strategis di masa mendatang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Vertikal Laporan Realisasi Anggaran

Analisis vertikal dilakukan terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2019 hingga 2023. Fokus analisis adalah pada struktur pendapatan dan belanja daerah.

B. Struktur Pendapatan Daerah

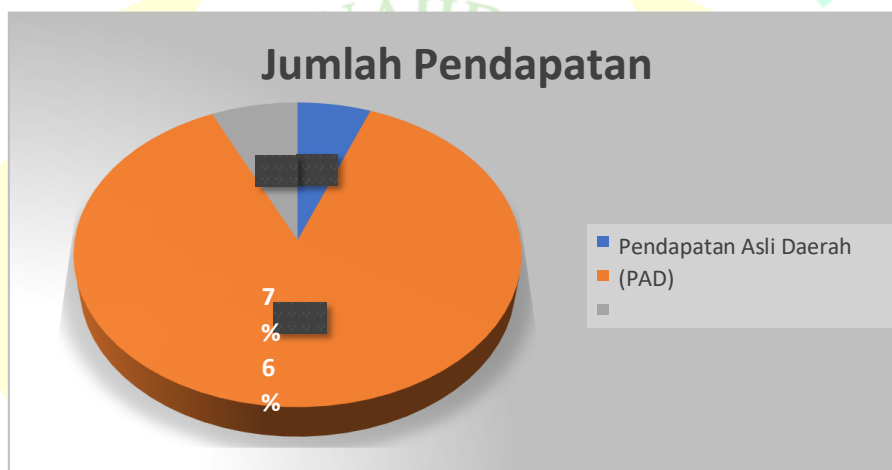
Tabel 3 menunjukkan persentase komponen pendapatan terhadap total pendapatan tahun 2023.

Tabel 3. Persentase Pendapatan 2023

| Kode | Jenis Pendapatan | Jumlah Pendapatan | Persentase Terhadap Total Pendapatan |
|-------|---|----------------------|--------------------------------------|
| 4 | PENDAPATAN | Rp 3.646.470.826.094 | 100,00% |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp 225.303.810.471 | 6,18% |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | Rp 77.701.111.344 | 2,13% |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | Rp 10.521.130.869 | 0,29% |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp 6.911.044.926 | 0,19% |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp 6.911.044.926 | 0,19% |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | Rp 3.394.267.067.948 | 93,08% |
| 4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp 3.142.238.093.000 | 86,17% |

| | | | |
|-------|---|----------------------|---------|
| 4.2.2 | Pendapatan Transfer Antara Daerah | Rp 252.028.974.948 | 6,91% |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Rp 3.646.470.826.095 | 100,00% |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | Rp 225.303.810.472 | 6,18% |
| 4.3.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Rp 12.339.233.924 | 0,34% |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp 266.177.659.046 | 7,30% |

Berdasarkan Tabel 3, pendapatan transfer mendominasi struktur pendapatan daerah, mencapai 93,08% dari total pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 6,18%, dengan pajak daerah sebagai kontributor utama sebesar 2,13%. Hal ini mengindikasikan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.



Gambar 2. Diagram Pendapatan 2023

Gambar 2 memvisualisasikan komposisi pendapatan daerah tahun 2023. Dominasi dana transfer (87%) menunjukkan keterbatasan kemandirian fiskal daerah. PAD yang hanya menyumbang 6% mengindikasikan perlunya upaya peningkatan sumber pendapatan lokal.

C. Struktur Belanja Daerah

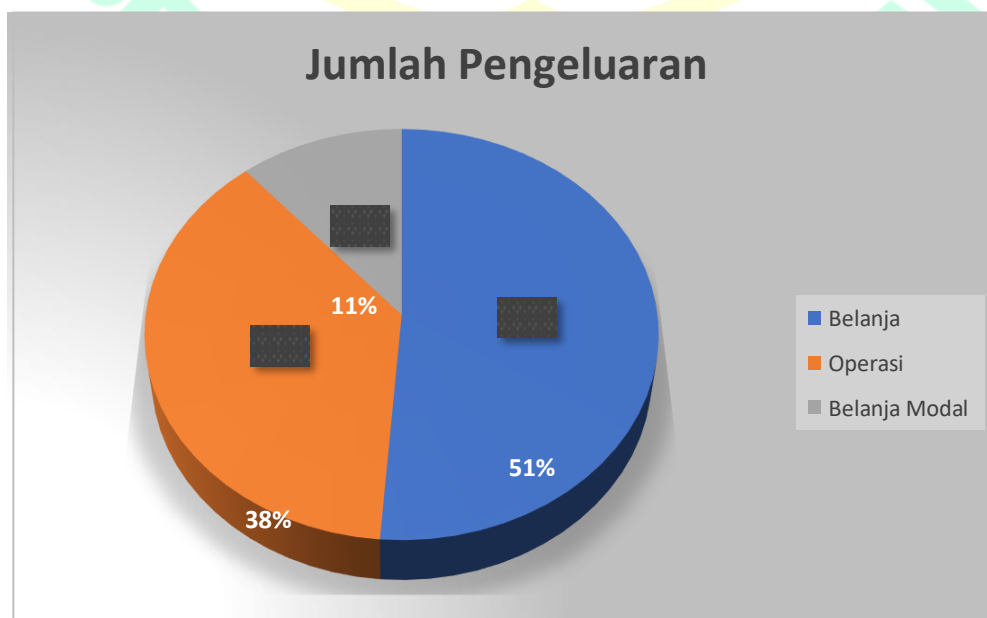
Tabel 4 menampilkan persentase komponen belanja terhadap total belanja tahun 2023.

Tabel 4. Persentase Pengeluaran 2023

| Kode | Jenis Pengeluaran | Jumlah Pengeluaran | Persentase Terhadap Total Pengeluaran |
|-------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 5 | BELANJA | Rp 3.160.543.747.851 | 100,00% |
| 5.1 | Belanja Operasi | Rp 1.618.744.679.563 | 51,22% |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | Rp 553.677.116.714 | 17,52% |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 932.115.017.057 | 29,49% |

| | | | | |
|-------|---|----|-------------------|--------|
| 5.1.5 | Belanja Hibah | Rp | 105.717.945.792 | 3,34% |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | Rp | 27.234.600.000 | 0,86% |
| 5.2 | Belanja Modal | Rp | 1.183.133.195.030 | 37,43% |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | Rp | 334.079.142 | 0,01% |
| 5.2.2 | Belanja Modal PeralatanMesin | Rp | 101.982.877.093 | 3,23% |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedungdan Bangunan | Rp | 251.690.333.428 | 7,96% |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi | Rp | 816.993.323.734 | 25,85% |
| 5,2,5 | Belanja Modal Aset TetapLainnya | Rp | 11.193.613.232 | 0,35% |
| 5.2.6 | Belanja Modal AsetLainnya | Rp | 938.968.400 | 0,03% |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | Rp | 573.847.132 | 0,02% |
| 5.3.1 | Belanja Tidak Terduga | Rp | 573.847.132 | 0,02% |
| 5.4 | Belanja Transfer | Rp | 358.092.026.126 | 11,33% |
| 5.4.1 | Belanja Bagi Hasil | Rp | 12.703.098.472 | 0,40% |
| 5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | Rp | 345.388.927.654 | 10,93% |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 5.000.000.000 | 0,16% |

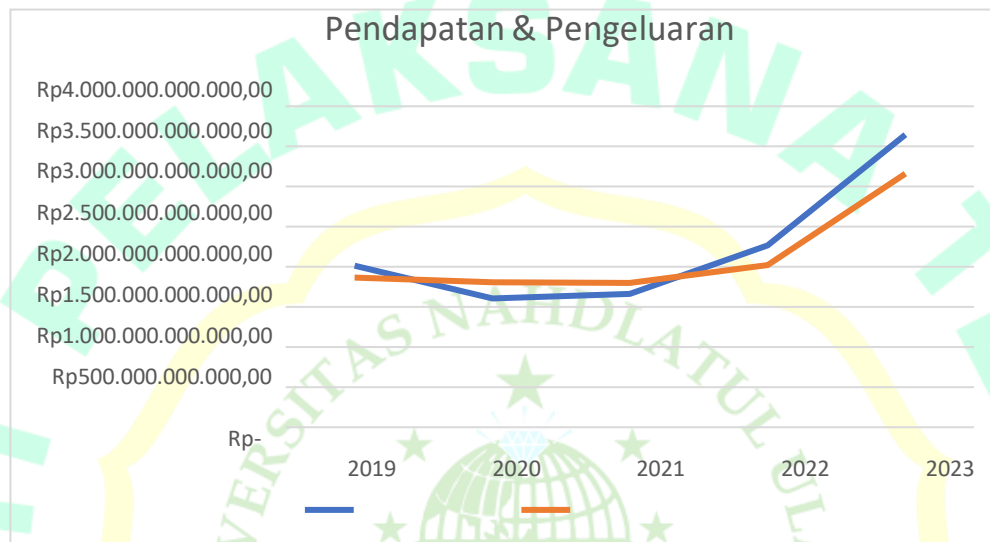
Berdasarkan Tabel 4, belanja operasi mendominasi struktur belanja dengan 51,22% dari total belanja. Belanja barang dan jasa menjadi komponen terbesar (29,49%), diikuti belanja pegawai (17,52%). Belanja modal mencapai 37,43%, dengan fokus utama pada infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi (25,85%).



Gambar 3. Diagram Pengeluaran 2023

Gambar 2 memvisualisasikan alokasi belanja daerah tahun 2023. Dominasi belanja operasional (51%) menunjukkan fokus pada pembiayaan kegiatan rutin pemerintahan. Porsi belanja modal yang cukup besar (38%) mengindikasikan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur daerah.

- D. Analisis Horizontal Laporan Realisasi Anggaran
 Analisis horizontal dilakukan dengan membandingkan LRA tahun 2019 dan 2023 untuk mengidentifikasi tren dan perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 4. Grafik LRA 5 Tahun

Gambar 4 menunjukkan tren pendapatan dan belanja daerah dari tahun 2019 hingga 2023. Beberapa observasi penting:

1. Pendapatan mengalami fluktuasi signifikan, dengan penurunan tajam pada tahun 2020-2021, kemungkinan akibat pandemi COVID-19. Namun, terjadi pemulihan dan peningkatan drastis pada tahun 2022-2023.
2. Belanja cenderung stabil dari tahun 2019-2022, namun mengalami peningkatan tajam pada tahun 2023, sejalan dengan kenaikan pendapatan.
3. Tren pendapatan dan belanja menunjukkan pola yang semakin divergen, dengan pendapatan meningkat lebih cepat dibandingkan belanja pada tahun 2023.

E. Perubahan Struktur Pendapatan dan Belanja

Analisis horizontal menunjukkan beberapa perubahan signifikan antara tahun 2019 dan 2023:

1. Peningkatan total pendapatan sebesar 81,26%, dari Rp 2,01 triliun (2019) menjadi Rp 3,65 triliun (2023).
2. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan menurun dari 7,78% (2019) menjadi 6,18% (2023), menunjukkan perlunya upaya peningkatan kemandirian fiskal.
4. Ketergantungan terhadap dana transfer meningkat, dari 71,04% (2019) menjadi 93,08% (2023).
5. Belanja modal mengalami peningkatan signifikan, dari 27,75% (2019) menjadi 37,43% (2023) dari total belanja, menunjukkan peningkatan investasi infrastruktur.
6. Proporsi belanja pegawai menurun dari 34,21% (2019) menjadi 17,52% (2023), mengindikasikan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia.

F. Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, beberapa implikasi dan rekomendasi dapat dirumuskan:

1. Perlunya strategi peningkatan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, misalnya melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
2. Efisiensi belanja operasional perlu ditingkatkan untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya pada belanja modal dan pembangunan.
3. Peningkatan belanja modal harus diimbangi dengan perencanaan yang matang untuk memastikan efektivitas dan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
4. Perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap struktur dan efisiensi belanja pegawai untuk memastikan produktivitas optimal.
5. Pengembangan strategi pengelolaan keuangan yang adaptif terhadap guncangan eksternal, seperti yang terjadi pada tahun 2020-2021.

Analisis vertikal dan horizontal terhadap LRA Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2019-2023 menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam total pendapatan dan belanja, masih terdapat tantangan dalam hal kemandirian fiskal dan efisiensi belanja. Pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan PAD, optimalisasi belanja, dan perencanaan strategis untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan pembangunan daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selama periode 2019-2023, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, terdapat peningkatan signifikan dalam total pendapatan daerah sebesar 81,26% dari tahun 2019 ke 2023, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun, struktur pendapatan masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, yang mencapai 93,08% pada tahun 2023, mengindikasikan ketergantungan fiskal yang tinggi. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan dari 7,78% menjadi 6,18%, menunjukkan perlunya upaya lebih untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dari sisi belanja, terjadi pergeseran prioritas yang signifikan. Proporsi belanja modal meningkat dari 27,75% menjadi 37,43%, menandakan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, proporsi belanja pegawai menurun dari 34,21% menjadi 17,52%, yang dapat diinterpretasikan sebagai upaya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Meskipun demikian, belanja operasional masih mendominasi dengan 51,22% dari total belanja pada tahun 2023, menunjukkan masih adanya ruang untuk peningkatan efisiensi.

Analisis tren lima tahun menunjukkan fluktuasi yang signifikan, terutama penurunan tajam pendapatan pada tahun 2020-2021 yang kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19. Namun, pemulihan yang cepat dan peningkatan drastis pada tahun 2022-2023 menunjukkan resiliensi dan adaptabilitas pengelolaan keuangan daerah. Divergensi antara tren pendapatan dan belanja pada tahun 2023, di mana pendapatan meningkat lebih cepat, mengindikasikan potensi surplus anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk investasi atau cadangan fiskal. Berdasarkan temuan-temuan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu fokus pada beberapa area kunci untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Pertama, diperlukan strategi komprehensif untuk meningkatkan PAD, termasuk optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru. Kedua, efisiensi belanja operasional harus terus ditingkatkan untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya pada belanja modal dan pembangunan. Ketiga, peningkatan belanja modal harus diimbangi dengan perencanaan yang matang dan evaluasi dampak untuk memastikan efektivitas investasi publik. Terakhir, pengembangan strategi pengelolaan keuangan yang adaptif terhadap guncangan eksternal sangat penting untuk menjaga stabilitas fiskal jangka panjang. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tanda-tanda positif dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu masih menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai kemandirian fiskal dan optimalisasi belanja. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan kapasitas penerimaan daerah, efisiensi belanja, dan perencanaan strategis untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Penulisan Antonius, F. (2023). Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Metode Vertikal Horizontal Untuk Menilai Kinerja keuangan Pemerintah daerah Pada Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019-2020 (Studi Kasus Pada Kantor BPKAD Kabupaten Sikka)
- Mustika, I.A.A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar Periode (2018-2021).

- Gunawan, A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2019-2022).
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Belanja Dlam Laporan Realiasi Anggaran
- Chartady, R. (2022). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran
- Sari, R.K. (2021). Analisis Laporan Keuangan Menggunakan Metode VertikalHorizontal Untuk Mengevaluasi Kinerja Keuangan Pada PT. Mandom Indonesia Tbk
- Supriati, D. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Harahap, E.J. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kasus Di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015-2019)
- Norma. (2020). Analisis kinerja keuangan pada badan pengelola keuangandaerah kabupaten enrekang.
- Rohman, F. (2020) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Di KabupatenJepara.